

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Perusahaan publik atau perusahaan terbuka merupakan jenis perseroan terbatas yang menawarkan saham atau obligasi kepada masyarakat umum dan memberikan sarana untuk bergabung dalam perusahaannya baik dalam kepemilikan, penetapan kebijakan dan pengelolaan dalam perusahaan manufaktur maupun industri. Menurut UU Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 pasal satu huruf dua menyatakan bahwa industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, dan barang setengah jadi untuk menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan usaha seperti eksplorasi sumber daya, produksi, dan pengolahan sebagai kesatuan usaha atau bentuk usaha terpisah. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berpengaruh besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara, Perusahaan pertambangan dari masa ke masa semakin bertambah karena perusahaan tambang memiliki potensi yang kaya serta perusahaan semakin terbuka untuk melakukan eksplorasi sumber daya tambang tersebut. Industri pertambangan memiliki perbedaan dengan industri lainnya. Salah satunya industri pertambangan memerlukan biaya investasi yang sangat besar, berjangka panjang, dan keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, menyebutkan bahwa sektor pertambangan mengalami penyerapan investasi terbesar pada periode Januari-Maret 2015 yaitu sebesar Rp 15 triliun atau 12% dari realisasi penanaman modal kuartal I 2015 ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com))

Perusahaan tambang juga merupakan perusahaan yang dalam kegiatannya melakukan pengolahan sumber daya dan transaksi ekonomi yang luas serta melibatkan banyak pihak yaitu *stakeholder* (pemasok, kreditur, konsumen, investor, dll). Oleh karena itu, perusahaan yang melibatkan banyak pihak khususnya memiliki banyak investor akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi, sehingga diharapkan untuk memiliki laporan

keuangan yang jujur dan benar. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.com](http://www.idx.com), hingga akhir tahun 2018 jumlah perusahaan publik yang terdaftar di BEI sebanyak 603 perusahaan yang terdiri dari beberapa sektor industri yaitu, pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, property dan real estate, infrastruktur, perdagangan dan jasa, keuangan, dan manufaktur. Berikut ini penulis sajikan tabel perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan akhir tahun 2018:

**Tabel 1.1**  
**Perusahaan Sektor Pertambangan**

Sektor	Sub Sektor	Jumlah
Pertambangan	Batu Bara	25
	Minyak dan Gas Bumi	10
	Logam dan Mineral	9
	Bebatuan	2
	Lainnya	1
Total		44

*Sumber: www.idx.com*

Adapun alasan peneliti memilih sektor pertambangan yaitu pertama, perusahaan tambang memiliki peran yang sangat besar yaitu sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kedua, pada tahun 2015 merupakan tahun terburuk bagi sektor pertambangan pada kasus PWC dimana kapitalisasi pasar turun sebesar 37%, namun sektor pertambangan masih tetap bertahan hingga perusahaan tambang tersebut mengalami peningkatan kembali. Ketiga, perusahaan besar pasti memiliki unit pengawasan dari pihak ekstern yang independen dalam mengawasi kinerja manajemen untuk meningkatkan laporan keuangan yang integritas, karena belakangan ini pihak ekstern lebih berfokus terhadap laba perusahaan. Dari beberapa alasan tersebut, maka peneliti menarik

untuk meneliti kembali mengenai atas pengawasan pihak ekstern terhadap perusahaan dan apakah perusahaan pertambangan akan menyajikan laporan keuangan yang berintegritas dengan kondisi kasus seperti tersebut.

Hubungan dari ke tiga alasan tersebut yaitu meskipun perusahaan mengalami penurunan, namun perusahaan tetap bisa bertahan dikarenakan perusahaan tetap mampu menangani atas risiko-risiko pada perusahaan dan tetap memanfaatkan pengawasan-pengawasan dari pihak eksternal seperti komisaris independen dan kepemilikan institusional sehingga perusahaan diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang berintegritas.

Seiring dengan berkembangnya usaha pertambangan di Indonesia, jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan banyak diminati untuk berinvestasi. Kepercayaan investor ataupun calon investor akan sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena semakin banyak orang yang percaya terhadap perusahaan maka keinginan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut akan semakin kuat. Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan perusahaan pertambangan tahun 2015-2018.

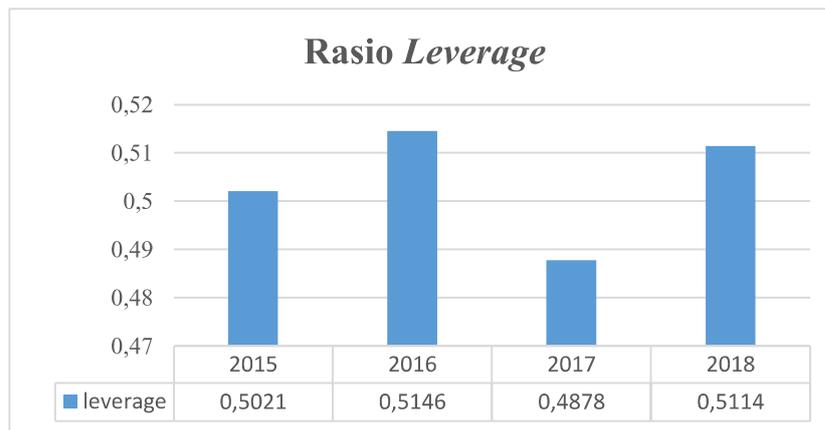


**Gambar 1.1**

**Perkembangan Sektor Pertambangan 2015-2018**

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan pertambangan tiap tahun mengalami peningkatan. Sebagai perusahaan publik,

penggunaan dana publik untuk kebutuhan aktivitas operasional perusahaan harus memiliki kinerja yang baik. Faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan salah satunya yaitu *leverage* yang dihitung menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) yang menunjukkan atas risiko pada perusahaan tersebut.



**Gambar 1.2**

### **Leverage Perusahaan Sektor Pertambangan tahun 2015-2018**

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada rasio *leverage* bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015-2016 *leverage* mengalami peningkatan sebesar 2,4%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,20%. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh aset perusahaan dibandingkan dengan utang perusahaan. Akan tetapi pada tahun 2018 *leverage* mengalami peningkatan kembali sebesar 4,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih memiliki risiko yang tinggi dikarenakan perusahaan lebih banyak dibiayai total utangnya dibandingkan dengan aset yang dimiliki.

Berdasarkan perusahaan pertambangan yang terus meningkat, kondisi rasio *leverage* yang tinggi, mampukah perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan sektor pertambangan yang berintegritas? Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian tentang integritas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di sektor pertambangan selama periode 2015-2018.

## 1.2. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan di Indonesia terutama yang *go public* atau terdaftar di pasar modal wajib melaporkan pencapaian target atas usahanya melalui informasi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan atas laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2) menjelaskan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Berbagai informasi yang tersedia dalam laporan keuangan harus jujur dan benar. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus berintegritas agar pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dapat menggunakan laporan tersebut dengan bijak dan dapat membuat keputusan yang tepat.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berintegritas. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2* menjelaskan bahwa integritas laporan keuangan merupakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak bias dan secara jujur dalam menyajikan informasi. Integritas laporan keuangan merupakan ukuran sejauh mana perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang jujur dan benar. *International Accounting Standard Board (IASB)* menetapkan dua fundamental kualitas yang harus dimiliki informasi yang termuat dalam laporan keuangan agar berguna dalam pembuatan keputusan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reability*). Laporan keuangan yang memenuhi syarat kualitatif memiliki beberapa karakteristik, seperti dijelaskan dalam *SFAC No 2* yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Oleh karena itu penting bagi setiap perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yg berintegritas. (Hendriksen & Van Breda, 2014).

Standar Akuntansi Keuangan memberikan kebebasan bagi perusahaan dalam memilih prinsip yang akan digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu prinsip yang dapat digunakan yaitu prinsip kehati – hatian atau dapat dikatakan dengan prinsip konservatisme. Namun, sejak 1 Januari 2012 Indonesia telah melakukan adopsi penuh IFRS (International Financial Reporting Standards) yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah mengadopsi penuh IFRS. Proses ini telah dimulai dari tahap adopsi di tahun 2008 – 2010 kemudian tahun 2011 memasuki tahap persiapan akhir dan diimplementasikan pada tahun 2012 (Imam, 2013). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sudah mengadopsi IFRS tersebut wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.

Dalam penelitian ini, integritas laporan keuangan diproksikan dengan konservatisme. Namun dengan seiringnya adanya adopsi penuh (konvergensi) IFRS, penggunaan prinsip konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan mulai tergeser. Hal tersebut mengakibatkan PSAK yang sudah mengacu pada Standar Akuntansi Internasional (konvergensi IFRS) memperkenalkan istilah baru yang dikenal dengan *prudence* sebagai pengganti dari prinsip konservatisme. Sehingga dalam penelitian ini integritas laporan keuangan diproksikan dengan prinsip *prudence*. Yang dimaksud dengan *prudence* dalam IFRS adalah pengakuan pendapatan yang boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) namun tetap saja menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengakuannya (Astriani, Suharto, & Sari, 2017).

Setelah SAK mengadopsi IFRS, IASB mengatakan bahwa sebenarnya baik *prudence* ataupun konservatisme bukanlah kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, sehingga diciptakan IFRS dengan harapan laporan keuangan dapat menjadi relevan dan andal. Namun, pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tetap harus berhadapan dengan ketidakpastian ditengah era IFRS. Hal yang

dianggap baik untuk mengatasi ketidakpastian tersebut yaitu dengan menganut prinsip *prudence* pada level yang tepat dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan terdapat beragam metode yang menerapkan prinsip *prudence*, antara lain PSAK No. 14 mengenai perhitungan biaya persediaan, PSAK No. 16 mengenai aktiva tetap dan penyusutan (2015), PSAK No. 19 mengenai amortisasi aktiva tidak berwujud dan PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan. (Basuki & Gunawan, 2019). PSAK No. 14 tentang Persediaan yang menjelaskan bahwa persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset yang menjelaskan bahwa penurunan nilai aset merupakan rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. (Astriani, Suharto, & Sari, 2017)

Terdapat beberapa kasus atau skandal yang terjadi pada suatu perusahaan yang berkaitan dengan prinsip *prudence* akuntansi, yaitu banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan memanipulasi data laporan keuangan sehingga membuat informasi pada laporan keuangan berintegritas rendah. Seperti pada kasus manipulasi dalam informasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan terdapat indikasi kecurangan pemalsuan laporan keuangan perseroan pada periode 2012 atas kontrak dengan perusahaan dagang Timur Tengah, yakni Agrocom Ltd dengan nilai US\$250 juta. Per Maret 2013, penjualan PT Garda Tujuh Buana Tbk anjlok 78,75% menjadi Rp 26,37 miliar dibandingkan dengan penjualan pada periode tahun sebelumnya sebesar Rp 124,10 miliar. Sehingga beban pokok pun turun menjadi Rp 40,02 miliar dari beban pokok penjualan yang sebelumnya sebesar Rp 61,85 miliar dan rugi kotor sebesar Rp 13,64 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp 62,25 miliar. Pendapatan dari selisih kurs juga didapat sebesar Rp 2,73 miliar, namun administrasi dan beban umum meningkat menjadi Rp7,75 miliar. Rugi sebelum pajak sebesar Rp 18,67 miliar per Maret 2013 dari laba sebelum pajak Rp 58,10 miliar tahun sebelumnya.

Sedangkan rugi per saham sebesar Rp 7,47 dari laba bersih per saham sebelumnya Rp 23,24. (Neraca.co.id, diakses pada 02 Oktober 2019).

Selain kasus tersebut, kasus manipulasi laporan keuangan juga terjadi pada PT Medco E&P Indonesia (MEPI) tahun 2015 diduga melakukan praktik kecurangan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pada pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi atas kontrak kerjasama dengan SKK Migas untuk wilayah kerja South and Central Sumatera (Blok SCS) periode 2013. Modus kecurangan yang diduga dilakukan PT MEPI ialah dengan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan dalam perhitungan cost recovery yang pada gilirannya mengurangi jumlah dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah. Terdapat beberapa item biaya yang diperhitungkan oleh PT MEPI dalam cost recovery yang tidak seharusnya menjadi biaya cost recovery, diantaranya adanya biaya yang terkait dengan blok Rimau tetapi justru dimasukkan pada pengeluaran Blok SCS, ada juga biaya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta beberapa biaya lainnya. Akibat manipulasi tersebut, miliaran dana “illegal” dinikmati oleh PT MEPI yang seharusnya menjadi bagian pendapatan Negara melalui SKK Migas. (Skornews.com, diakses pada 02 Oktober 2019).

PT Timah (Persero) Tbk, pada tahun 2016 diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I 2015. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan untuk menutupi kinerja keuangan PT Timah yang dimana kondisi keuangan PT Timah terus mengkhawatirkan sejak tiga tahun belakangan (dimulai dari tahun 2013), serta pada semester I 2015 laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar Rp 59 milyar. Ketidakmampuan jajaran Direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. (Tambang.co.id, diakses pada 22 September 2019)

Pada tahun yang sama juga, Direksi PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena telah melakukan kasus penggelapan, manipulasi akuntansi serta masalah terkait pengungkapan palsu yang diarahkan oleh presiden direktur ini. Direksi

CKRA telah menggelembungkan nilai aset CKRA secara sengaja dengan cara mengkonsolidasikan laporan keuangan secara palsu serta melebih-lebihkan nilai modal yang telah disetor dari dua tambang tersebut sehingga para investor tidak bisa membuat keputusan investasi yang tepat dan menyebabkan para investor mengalami kerugian yang signifikan dari pengungkapan pelaporan keuangan yang palsu tersebut. (beritaLima.com, diakses pada 22 September 2019).

Kasus yang terjadi ini bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal sehingga secara umum berpengaruh terhadap laporan keuangan yang berintegritas. Dapat disimpulkan dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan dari sumber yang didapatkan, terjadinya kasus manipulasi pada laporan keuangan mencerminkan bahwa secara tidak langsung menunjukkan laporan perusahaan tersebut tidak berintegritas. Sehingga dibutuhkan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu diantaranya *leverage* untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan fenomena yang terjadi, yang salah satunya pada perusahaan Cakra Mineral Tbk, yang memiliki kondisi keuangan yang begitu mengkhawatirkan dikarenakan perusahaan tersebut mengalami kerugian yang dimana dari fenomena tersebut dapat mencerminkan risiko keuangan perusahaan. Sehingga pada penelitian ini, tidak hanya mengenai risiko keuangan, namun juga dibutuhkan pihak pengawas untuk mengawasi jalannya suatu perusahaan. Fungsi pengawasan tersebut menggunakan variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional, sehingga diharapkan perusahaan menyajikan laporan keuangan yang berintegritas.

Dalam suatu laporan yang memiliki integritas, maka diperlukan suatu informasi yang benar, jujur, serta tidak bias sehingga diperlukan untuk pengambilan suatu keputusan dengan tepat. Dalam struktur organisasi perusahaan yang besar, biasanya memiliki komisaris independen. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak terafiliasi atau tidak memiliki keterkaitan dengan direksi, manajemen, pemegang saham pengendali dan anggota komisaris lainnya sehingga bebas dari hubungan apapun baik hubungan bisnis maupun

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen pada perusahaan. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi kinerja para anggota direksi perusahaan, sehingga para direksi berkinerja sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan sebelumnya (Prawirosentono & Primasari, 2014).

Menurut Aji dalam Wulandari dan Budiarta (2014) komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam suatu mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap para investor dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan. Selain itu, dengan adanya fungsi komisaris independen sebagai pengawas kinerja manajemen secara menyeluruh, maka komisaris independen dapat diharapkan dari perusahaan dengan memiliki tingkat proporsi yang lebih tinggi dalam pengungkapan informasi yang lebih andal (Saskatoma, 2014). Dalam penelitian Rahiim dan Wulandari (2014) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen ataupun internal perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Rahmatika (2017) yang memperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya anggota dewan komisaris harus independen, karena suatu perusahaan pasti memiliki target yang harus dicapai dalam mendapatkan keuntungan atas usahanya. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen sangat penting untuk menilai laporan keuangan perusahaan yang disajikan dalam melakukan pengawasan serta diharapkan mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan terutama dalam integritas informasi dalam laporan keuangan.

*Leverage*, merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik dalam jangka panjang maupun pendek. *Leverage* juga menggambarkan seberapa besar dana yang diperoleh dari pemilik dan berapa dana yang diperoleh dari pinjaman. Oleh karena itu tinggi atau rendahnya *leverage* akan mempengaruhi integritas laporan keuangan. Perusahaan dengan tingkat *leverage*

yang tinggi cenderung ingin melaporkan laba lebih tinggi agar perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terhadap melanggar perjanjian utang. Namun dengan *Leverage* yang tinggi perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan perusahaan dengan leverage yang rendah. Dengan *leverage* yang tinggi maka perusahaan dituntut oleh *stakeholder* untuk melaporkan laporan keuangan yang berintegritas, karena bagi *stakeholder* laporan keuangan tersebut merupakan sumber informasi yang kompeten.

Hasil penelitian terdahulu Gayatri & Saputra (2013) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki utang yang lebih tinggi, maka investor akan menuntut perusahaan untuk menghasilkan laba yang besar sehingga akan berdampak pada meningkatnya risiko pada perusahaan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajaryani (2015) dan Noviantari & Ratnadi (2015) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan dalam penelitian Watts (2003) dalam Fajaryani (2015) dengan hipotesis utang (*debt covenant hypothesis*) bahwa utang yang semakin tinggi pada perusahaan atau semakin dekat perusahaan ke arah pelanggaran persyaratan utang yang didasarkan atas angka akuntansi, maka manajer perusahaan akan terdorong untuk menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang rendah melalui pemilihan prosedur akuntansi dengan memindahkan laba periode mendatang ke periode tahun berjalan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan instansi atau lembaga yang meliputi bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan oleh institusi, akan mengurangi konflik keagenan akibat perbedaan kepentingan manajerial dengan pemegang saham melalui pengawasan dalam proses peningkatan perusahaan dengan melalui mekanisme pengontrolan yang tepat. Dengan adanya pengawasan, maka akan lebih efektif dan tidak akan mudah diperdaya oleh tindakan manajer seperti dalam memanipulasi penyajian laporan keuangan yang dapat melemahkan integritas laporan keuangan tersebut.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Fajaryani (2015) berpendapat bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dapat membatasi perilaku oportunistik manajer dalam pengendalian dan pengambilan keputusan. Tingkat pengawasan yang ketat yang dilakukan dari institusi sebagai pemilik saham perusahaan, maka akan mampu mengurangi perilaku manajer yang bertindak dengan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Hal ini selaras dengan penelitian Fajaryani (2015) bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini sependapat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiarta (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang dapat mendorong tingkat pengawasan terhadap suatu kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahiim dan Wulandari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan karena dengan adanya kepemilikan institusional akan menjadikan manajer menjadi terkait dengan target yang diinginkan investor dalam mendapatkan keuntungan sehingga apabila manajer terdesak maka akan kemungkinan manajer melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Dari hasil penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi penelitian yang berbeda pada beberapa variabel. Sehingga penelitian ini masih relevan serta layak untuk diteliti kembali. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin menganalisa lebih jauh lagi mengenai beberapa variabel yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Peneliti terdahulu memperoleh hasil yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada pihak intern, sedangkan penelitian ini, akan mencoba meneliti dengan menggunakan dua variabel dari pihak ekstern yaitu komisaris independen dan kepemilikan institusional. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh komisaris independen, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2015-2018. Dari uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018.**

### **1.3. Perumusan Masalah**

Informasi laporan keuangan merupakan sumber utama untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan harus memiliki integritas yang tinggi karena akan digunakan oleh pihak yang menggunakan laporan keuangan, baik pihak internal maupun pihak eksternal untuk pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan harus berintegritas. Integritas laporan keuangan memiliki arti yaitu dimana perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang sesungguhnya. Namun dalam penyajian laporan keuangan banyak terjadi kasus-kasus perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesungguhnya. Ketidak jujuran dalam penyajian laporan keuangan akan berdampak pada penurunan kepercayaan para pengguna laporan keuangan.

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini, sehingga perlu dilakukan penelitian ulang tentang pengaruh komisaris independen, *leverage*, dan integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di bahas sebelumnya, berikut ini merupakan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan yaitu:

1. Bagaimana Komisaris Independen, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

3. Apakah terdapat pengaruh secara Parsial:
  - a. Apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
  - b. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
  - c. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai Komisaris Independen, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari Komisaris Independen, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Untuk mengetahui Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
  - b. Untuk mengetahui *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
  - c. Untuk mengetahui Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti sangat berharap agar hasil penelitian yang sudah dilakukan ini dapat diperoleh manfaatnya bagi pihak lain seperti akademisi, peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan penelitian dengan penelitian ini, bermanfaat bagi perusahaan dan bagi investor di suatu hari nanti. Selain itu, Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi sebagai sumber referensi untuk penelitian sejenis terutama tentang integritas laporan keuangan pada perusahaan seluruh Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut dijelaskan harapan-harapan penulis:

### **1.5.1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah pemahaman peneliti mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar di BEI dan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

### **1.5.2. Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan perusahaan dalam menyajikan suatu laporan yang memiliki integritas sehingga berguna untuk para investor dalam pengambilan keputusan secara tepat dalam berinvestasi.

## **1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian tugas akhir secara garis besar.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka penelitian secara ringkas dan padat mengenai landasan teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis jawaban dari masalah penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji validitas dan reliabilitas. Bab ini berisi tentang karakteristik penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang diuraikan secara kronologis dan sistematis.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan peneliti, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian, dan saran yang dirumuskan secara kongkrit.